

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, M. Arief , 2003, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang, CV Bayu Media.
- Andriani, Nurul Saadah dkk, 2012, *Panduan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, Yogyakarta, Sapda.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Basuki, Sulistiyo, 2006, *Metode Penelitian*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu & Joenadi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

- Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, Alumni.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan; Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marwan, M. & Jimmy .P, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nazir, Moch., 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Prints, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta Djambatan.
- Purnomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana; Edisi Revisi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- _____, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill-Co.
- Sianturi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- Siregar, Veni, 2016, “Alat Bukti yang Digunakan Pada Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Ruang Tertutup/Tidak Ada Saksi Selain Korban”, dalam Ludwina Inge Nurtjahyo dan Choky Raadhan, *Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Jakarta, MAPPI FHUI.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum; Cetakan Ketiga*, Jakarta, UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas, Diponegoro.
- _____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Thomas, Charles W. & Donna M. Bishop, 1987, *Criminal Law Understanding Basic Principles*, California, Sage Publication Inc.
- van Bemmelen, J.M., 1986, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Terjemahan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Refika Aditama.
- Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

B. Jurnal

- Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, No.1, Januari-Maret, 2015, Manado.
- Asprianti Wangke, “Kedudukan Saksi *De Auditu* dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No.6, Agustus 2017, Bandung.
- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol.1, No.1, Januari-April 2015, Jakarta.
- Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.5, No.2, 2016, Jakarta.

Steven Suprantio, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” dalam Peradilan Pidana: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No.1, April 2014, Bandung.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Diana Since Kesaulya, “Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Laili Nur Anisah, “Penerapan Minimum Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Yanels Gersione Damanik, “Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indoensia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010 perihal Peninjauan Kembali perkara Jefri Oloandika Silalahi Bin Jarasmin Silalahi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal Uji Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 8/Pid.B/2013/PN.Gst, tertanggal 21 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 375/Pid.Sus/2013/PN.Ptk, tertanggal 19 Desember 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 69/Pid.B/2014/PN.Sdn, tertanggal 16 Juli 2014.

F. Internet

Josua Sitompul, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, *HukumOnline*,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses pada tanggal 16 September 2017 pukul 22.30 WIB.

Komnas Perempuan, "Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2013", <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-komnas-perempuan-2014-kegentingankekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 22.25 WIB.

Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan Tahun 2014", <http://www.komnasperempuan.go.id/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segeraputus-impunitas-pelaku/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 22.40 WIB.

Komnas Perempuan, "Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari *Gang Rape* Hingga *Femicide*, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 23.05 WIB.

Rizal Bomantama, "Kekerasan Seksual Dominasi Kejahatan Terhadap Anak di Tahun 2017", <http://www.tribunnews.com/tag/jakarta-timur?url=metropolitan/2018/02/25/2-pelaku-pembunuhan-juragan-bakmi-di-lubang-buaya-diduga-keponakannya-begini-kejadiannya>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 23.20 WIB.

Yusti Purba, "Saksi Berantai (Kettingbewijs) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, https://www.kompasiana.com/yustypurba/saksi-berantai-kettingbewijs-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia_58145b564523bd513ec7c20d, diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 22.15 WIB.